

KEMANDIRIAN DAN EFEKTIVITAS PEMERINTAH DAERAH DIMASA PANDEMI COVID 19

Nugraeni^{1*}, Ratri Paramitalaksmi², Zaenal Wafa³

^{1,2,3} Universitas Mercu Buana Yogyakarta, Jl. Wates km 10, Argomulyo, Sedayu, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, 55752, Indonesia

nugraeni@mercubuana-yogya.ac.id^{*}, ratriparamitalaksmi@gmail.com², zaenalwafa@gmail.com³

*Penulis Korespondensi

Artikel Info

Diterima : 03-02-2022

Direvisi : 08-4-2022

Disetujui: 10-5-2022

Publikasi : 31-05-2022

Kata Kunci:

Pemerintah Daerah, Kemandirian, Efektivitas

Abstrak

Ketercapaian pengelolaan keuangan di daerah dapat menunjukkan apakah dikelola secara ekonomis, efisien dan efektif serta transparansi dan akuntabel. Penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan daerah disusun berdasar PSAP No. 1 dilakukan oleh Pemda. Penyebaran Covid-19 di tahun 2020 sangat cepat, berdampak pada: kesehatan, ekonomi (makro, mikro), sosial dan termasuk anggaran keuangan negara dan daerah. Rasio keuangan digunakan dalam penilaian kinerja Pemda yaitu bagaimana mengelola keuangan daerahnya. Rasio yang dipakai dalam hal ini : Kemandirian dan Efektivitas. Metode Kualitatif deskriptif digunakan dalam penelitian ini dan tujuannya menggambarkan, meringkas berbagai fenomena tertentu. Hasilnya Rasio kemandirian rendah sebesar 50%, artinya sangat tinggi daerah bergantung pada bantuan pemerintah pusat, rendahnya sumbangan masyarakat di pembangunan daerah. Sangat efektif sebesar 70%, hal ini berarti Pemda dapat merealisasikan PAD yang direncanakan sesuai target.

Keywords:

Local Government, Independence, Effectiveness

Independence and Effectiveness of Regional Government during the Covid 19 Pandemic

Abstract

The achievement of financial management in the regions can show whether it is managed economically, efficiently and effectively as well as transparency and accountability. Submission of regional financial accountability reports prepared based on PSAP No. 1 is carried out by the local government. The spread of Covid-19 in 2020 is very fast, having an impact on: health, economy (macro, micro), social and including state and regional financial budgets. Financial ratios are used in assessing the performance of local governments, namely how to manage their regional finances. The ratio used in this case: Independence and Effectiveness. Descriptive qualitative method is used in this research and the aim is to describe, summarize certain phenomena. The result is a low independence ratio of 50%, meaning that the region is very dependent on central government assistance, and the community's contribution to regional development is low. Very effective at 70%, this means that the local government can realize the planned PAD according to the target.

How to cite :

Nugraeni, Paramitalaksmi, R., & Wafa, Z. (2022). Kemandirian dan Efektivitas Pemerintah Daerah Dimasa Pandemi Covid 19. *JRAMB*, 8(1), 22-29. Doi : <https://doi.org/10.26486/jramb.v8i1.2337>

PENDAHULUAN

Pemerintah pusat memberikan delegasi kepada Pemda supaya melaksanakan serta mengatur sendiri daerahnya (Wulandari, Nugraeni, & Wafa, 2018). Dengan program otonomi daerah, Pemda melaksanakan pembangunan guna pelayanan masyarakat. Terwujudnya *good governance*, dapat dilihat dari peningkatan kemandirian, keterbukaan dan dapat dipercaya publik, Pemda yang semakin responsif terhadap masyarakat, keikutsertaan masyarakat dalam pembangunan meningkat, efisiensi dan efektivitas dalam mengelola keuangan dan melayani masyarakat, demokratisasi,



merupakan tujuan pelaksanaan otonomi daerah (Mahmudi, 2010). Pemda berkewajiban menyampaikan laporan keuangan yang akuntabel kepada pemerintah pusat dan masyarakat. Kemampuan Pemda untuk mengelola keuangan bisa dilihat dari APBD, hal ini menggambarkan mampu tidaknya Pemda untuk melaksanakan tugasnya, membangun dan melayani masyarakat. Penyebaran Covid-19 di tahun 2020 sangat cepat, berdampak pada: kesehatan, ekonomi (makro mikro), sosial dan termasuk anggaran keuangan negara dan daerah. Pemerintah mengesahkan UU No. 2 Tahun 2020, terdiri dari dua hal: (1) garis haluan keuangan negara dan keuangan daerah; (2) garis haluan keseimbangan sistem keuangan.

Berikut kondisi pandemi covid 19 di beberapa provinsi di Indonesia selama tahun 2020 dan Januari 2021.



Gambar 1. Skor Indeks Kerentanan Provinsi

Sumber : Katadata insight center

Dalam rangka menilai kinerja pengelolaan keuangan Pemda, bisa dilakukan dengan analisis rasio keuangan. Rasio penelitian yang dipakai adalah Kemandirian dan Efektivitas. PSAP Nomor 4 menegaskan keberhasilan penilaian kinerja bisa dilihat dari efisiensi dan efektivitas. Penilaian kinerja keuangan dihubungkan dengan tujuan dan sasaran renstra pemda serta indikator yang dipakai disesuaikan PP dan UU. Pada organisasi publik khususnya Pemda, penggunaan analisis rasio keuangan dilakukan, disebabkan :

1. Perbedaan antara penyajian laporan keuangan Pemda dengan organisasi swasta
2. Ketercapaian pelaksanaan APBD lebih ditekankan pada pencapaian output dan outcome.

Penelitian tentang analisis rasio keuangan, antara lain (Pilat & Morasa, 2017) dalam penelitiannya menemukan bahwa kemandirian Pemkot Manado sangat rendah, (Sumual, Kalangi, & Gerunggai, 2017) dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa Pemkot Tomohon sebagai kota yang efektif, sedangkan kemandirian dan efisien belum memenuhi sesuai standar yang diinginkan, secara keseluruhan kurang baik untuk kinerja keuangannya, (Sholikah, 2017) rasio kemandirian mengalami kenaikan dari tahun ke tahun mencapai tingkatan sangat baik, rasio efektivitas sangat efektif dalam mengelola APBD telah berhasil mewujudkan sasaran dan mencapai tujuannya, (Arumdani, 2019) kemandirian pemkot Medan menunjukkan tingkat konsultatif, dan kurang efektif., (Pramono, 2014) kemandirian Pemkot Surakarta sangat rendah.

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui tingkat kemandirian dan tingkat efektivitas Pemda propinsi di Indonesia dimasa pandemic covid 19 dari laporan keuangan tahun 2020. Dari hasil penelitian ini juga dapat memberikan kontribusi kepada Pemda propinsi untuk mengurangi ketergantungan pada pihak eksternal terutama Pemerintah pusat, mencari sumber PAD yang lain yang belum tereksploitasi, juga bagaimana menyusun strategi kemandirian dan pengelolaan keuangan yang efektif di masa pandemic covid 19.

Rasio Keuangan Pemerintah Daerah

Untuk menilai organisasi menjalankan tugas dan tanggungjawabnya, diperlukan suatu pengukuran kinerja. Pengelolaan keuangan daerah harus diatur sesuai UU. APBD adalah alat yang dipakai untuk melakukan kebijakan utama bagi Pemda, guna pengembangan kapabilitas dan efektivitas. APBD dipakai guna menganggarkan jumlah pendapatan dan belanja, sebagai bahan dalam pengambilan keputusan dan target pembangunan, pengeluaran dimasa depan, sumber pembangunan indikator untuk evaluasi kinerja, memberikan motivasi pegawai dan untuk mengkoordinasikan semua aktivitas unit kerja.

Pemda bertanggungjawab terhadap jalanya pemerintah, pembangunan dan melayani masyarakat dan berkewajiban mempertanggungjawabkan keuangan untuk menilai kinerjanya. Mengukur kinerja keuangan Pemda maka dapat dilakukan analisis atas APBD yang disahkan dan ditindaklanjuti.

Analisis terhadap laporan keuangan dapat membantu dalam:

- a. Pemahaman laporan keuangan
- b. Mengerti semua angka di laporan keuangan
- c. Evaluasi laporan keuangan
- d. Memanfaatkan informasi keuangan dalam mengambil keputusan.

Informasi keuangan yang dipakai guna melihat kinerja keuangan Pemda yakni Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Neraca. Dari kedua laporan keuangan Pemda tadi dapat dilakukan analisis terhadap pendapatan, belanja dan pembiayaan. Pada penelitian ini hanya digunakan analisis pendapatan dengan dua rasio yaitu kemandirian, dan efektivitas.

Rasio Kemandirian dan Efektivitas

Untuk mengerti permasalahan dan memanfaatkan kesempatan dari informasi keuangan, digunakan Analisis Laporan Keuangan (Mahsun 2011). Analisis dari APBD perlu dilaksanakan untuk melihat keuangan daerah yang dikelola apakah transparansi, apa adanya, efektifitas, efisiensi, serta dapat dipertanggungjawabkan. Kaidah pengakuntansian di pemerintahan tidak sama dengan di swasta.

Analisis keuangan APBD dapat diterapkan dengan:

1. Pencapaian hasil saat ini dibandingkan dengan periode sebelumnya.
2. Rasio keuangan Suatu Pemda tertentu dibandingkan daerah lain yang terdekat atau yang kekuatan daerahnya hamper sama.

Rasio kemandirian memperlihatkan ketergantungan daerah pada sumber dana luar (Halim 2012). Kemandirian mengindikasikan kekuatan Pemda untuk mendanai sendiri kegiatan pemerintah, membangun juga melayani masyarakat sebagai imbalan tidak langsung bagi kepatuhan wajib pajak juga pungutanoleh pemerintah sebagai komponen penerimaan daerah. Rasio kemandirian ditunjukkan dari perolehan Pendapatan Asli Daerah (PAD) disandingkan dengan penerimaannya didapat dari Pendapatan transfer seperti : DBH pajak, sumberdaya alam, DAU dan DAK, Dana darurat dan utang.

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{PAD}}{\text{Penerimaan keseluruhan}} \times 100\%$$

Ketergantungan Pemda pada sokongan pihak luar (pemerintah pusat) semakin rendah, maka dikatakan kemandirian tinggi. Tingkat partisipasi wajib pajak untuk membayar dan retribusi daerah yang semakin rendah, maka kemandirian juga semakin rendah. Angka partisipasi warga terhadap pembangunan juga menggambarkan kemandirian. Masyarakat yang tingkat kesejahteraannya meningkat, maka diharapkan semakin meningkat juga masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Tabel.1. Pola hubungan dan tingkat kemandirian daerah

Kemampuan Keuangan	Kemandirian (%)	Pola hubungan
Rendah Sekali	0% - 25%	Instruktif
Rendah	25% - 50%	Konsultatif
Sedang	50% - 75%	Partisipasif
Tinggi	75% - 100%	Delegatif

Sumber : Rahmatina (2011)

- Instruktif, peran pemerintah pusat lebih dominan daripada kemandirian Pemda (daerah yang tidak mampu melaksanakan otonomi daerah)
- Konsultatif, dimana campur tangan pemerintah pusat sudah mulai berkurang, karena daerah dianggap sedikit lebih mampu melaksanakan otonomi.
- Partisipatif, peranan pemerintah pusat semakin berkurang, mengingat daerah bersangkutan tingkat kemandiriannya mendekati mampu melaksanakan urusan otonomi.
- Delegatif, campur tangan pemerintah pusat sudah tidak ada karena daerah telah benar-benar mampu dan mandiri dalam melaksanakan urusan otonomi daerah.

Kesanggupan Pemda dalam mengusahakan ketercapaian PAD yang dianggarkan disandingkan dengan anggaran yang ditetapkan digambarkan dengan rasio efektivitas (Halim, 2012). Pemda disebut sanggup melakukan tugasnya jika rasio yang didapat minimal 1 atau 100%. Kemampuan daerah yang semakin baik, maka semakin efektif.

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{PAD diterima}}{\text{PAD dianggarkan}} \times 100\%$$

Tabel 2. Kriteria Pengukuran Efektivitas

Kriteria Efektivitas	Persentase (%)
Sangat Efektif	>100
Efektif	100
Cukup Efektif	90 - 99
Kurang Efektif	75 – 89
Tidak Efektif	< 75

Sumber: Mahmudi 2016

METODE

Jenis penelitian yaitu penelitian yang mengikutkan seluruh populasi menjadi sampel, sehingga jumlah sampel dan populasi sama yaitu 34 Pemda Propinsi di seluruh Indonesia. Sedangkan obyek penelitian ini adalah laporan keuangan Pemda Propinsi tahun 2020 yang sudah diaudit oleh BPK di tahun 2021 sebanyak 34 propinsi. Untuk metode dalam menganalisis data digunakan analisis rasio Kemandirian dan Efektivitas.

1. Rasio Kemandirian

Memperlihatkan kesanggupan Pemda untuk membiayai sendiri pelaksanaan pemerintahan, membangun juga melayani masyarakat sebagai imbalan langsung kepada wajib pajak yang melaksanakan kewajiban perpajakannya serta retribusi sebagai sumber PAD.

PAD

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{PAD}}{\text{Total penerimaan}} \times 100\%$$

2. Rasio Efektivitas

Memperlihatkan kesanggupan Pemda untuk merealisasikan PAD yang dianggarkan dengan rencana yang disyahkan disesuaikan dengan potens riil daerah.

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{PAD sesungguhnya}}{\text{PAD dianggarkan}} \times 100\%$$

Metode analisis digunakan deskriptif pendekatan kuantitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tabel 3. Rasio Kemandirian

Provinsi	Hasil	Kemampuan keuangan	Pola hubungan
Aceh	17,8	Rendah sekali	Instruktif
Sumatra Utara	42,99	Rendah	Konsultatif
Sumbar	35,43	Rendah	Konsultatif
Riau	40,88	Rendah	Konsultatif
Jambi	34,89	Rendah	Konsultatif
Sumsel	36,38	Rendah	Konsultatif
Bengkulu	25,56	Rendah	Konsultatif
Lampung	40,49	Rendah	Konsultatif
Jakarta	66,95	Sedang	Partisipasif
Jabar	53,68	Sedang	Partisipasif
Jateng	53,83	Sedang	Partisipasif
Yogyakarta	33,44	Rendah	Konsultatif
Jatim	56,75	Sedang	Partisipasif
Kalbar	38,02	Rendah	Konsultatif
Kalteng	32,94	Rendah	Konsultatif
Kalsel	43,78	Rendah	Konsultatif
Kaltim	52,20	Sedang	Partisipasif
Sulut	22,90	Rendah sekali	Instruktif
Sulteng	26,77	Rendah	Konsultatif
Sulsel	41,54	Rendah	Konsultatif
Sultenggara	25,35	Rendah	Konsultatif
Bali	53,68	Sedang	Partisipasif
NTB	35,09	Rendah	Konsultatif
NTT	21,52	Rendah sekali	Instruktif
Maluku	17,92	Rendah sekali	Instruktif
Papua	10,66	Rendah sekali	Instruktif
Maluku Utara	10,66	Rendah sekali	Instruktif
Banten	99,92	Tinggi	Delegatif
Bangka Belitung	28,41	Rendah	Konsultatif
Gorontalo	22,27	Rendah sekali	Instruktif
Kepri	34,02	Rendah	Konsultatif
Papua Barat	5,70	Rendah sekali	Instruktif
Sulbar	17,30	Rendah sekali	Instruktif
Kalut	0,29	Rendah sekali	Instruktif

Sumber : data diolah 2021

Dari tabel 3, untuk rasio kemandirian terlihat bahwa ada 1 (3%) pemda yang peringkat kemandiriannya tinggi, ada 6 (18%) pemda yang peringkat kemandiriannya sedang, ada 17 (50%) pemda yang peringkat kemandiriannya rendah dan ada 10 (29%) pemda yang peringkat kemandiriannya rendah sekali. Daerah menggantungkan terhadap sumber dana luar digambarkan dalam rasio kemandirian. Dari data terlihat rasio kemandirian rendah sebesar 50% , maksudnya daerah menggantungkan pada transfer pemerintah pusat, sangat tinggi. Tingkat keikutsertaan masyarakat dalam pembangunan daerah digambarkan dengan kemandirian. Semakin rendah tingkat keikutsertaan masyarakat memenuhi kewajiban perpajakan dan pungutan daerah maka semakin rendah kemandirian. Hal ini memperlihatkan kesejahteraan masyarakat semakin menurun. Hal ini dapat kita maklumi, dimasa awal pandemi covid 19 tahun 2020, masyarakat banyak yang kehilangan pekerjaan juga adanya ketakutan. Jangankan untuk membayar pajak, untuk hidup layak sehari hari juga masih kurang. Pemutusan kerja dan kemiskinan meningkat. Tempat wisata ditutup, sehingga pemerintah daerah kehilangan sumber PAD yang besar dari pembayaran pajak dan pungutan tempat wisata. Dilihat dari pola hubungan maka 50% daerah konsultatif, artinya keterlibatan pemerintah pusat mulai menurun, mengindikasikan daerah lebih sanggup melakukan pemerintahan sendiri, meski ketergantungan keuangan masih tinggi ke pemerintah pusat.

Tabel 4. Rasio Efektivitas

Provinsi	Hasil	Rasio efektivitas
Aceh	97,96	Efektif
Sumatra Utara	100,00	Sangat efektif
Sumbar	103,70	Sangat efektif
Riau	98,59	Efektif
Jambi	112,80	Sangat efektif
Sumsel	93,31	Efektif
Bengkulu	63,78	Kurang efektif
Lampung	86,17	Cukup efektif
Jakarta	98,24	Efektif
Jabar	84,84	cukup efektif
Jateng	95,80	Efektif
Yogyakarta	86,73	Cukup efektif
Jatim	116,20	Sangat efektif
Kalbar	80,17	Cukup efektif
Kalteng	105,67	Sangat efektif
Kalsel	90,92	Efektif
Kaltim	122,26	Sangat efektif
Sulut	95,79	Efektif
Sulteng	107,80	Sangat efektif
Sulsel	86,51	Cukup efektif
Sultenggara	83,08	Cukup efektif
Bali	89,36	Efektif
NTB	91,73	Efektif
NTT	73,42	Kurang efektif
Maluku	105,27	Sangat efektif
Papua	117,17	Sangat efektif
Maluku Utara	269,66	Sangat efektif
Banten	71,58	Kurang efektif
Bangka Belitung	91,36	Efektif
Gorontalo	125,25	Sangat efektif
Kepri	91,74	Efektif
Papua Barat	93,83	Efektif
Sulbar	115,95	Sangat efektif
Kalut	0,77	Tidak efektif

Sumber: olahan data 2021

Tabel 4, rasio keefektivan terlihat bahwa 12 (35%) Pemda yang peringkat sangat efektif, 12 (35%) Pemda yang peringkat efektif, 5 (15%) Pemda yang peringkat cukup efektif, 3 (9%) dan 1 (6%) Pemda yang peringkat tidak efektif. Kekuatan Pemda untuk mendapatkan PAD yang dianggarkan dibanding anggaran yang disyahkan didasarkan potensi riil daerah digambarkan dari Rasio efektifitas. Kekuatan daerah semakin baik, berarti semakin tinggi rasio efektifitas. Dari data terlihat bahwa 70% pemda dapat merealisasikan PAD yang dianggarkan sesuai target.

KESIMPULAN

Kesimpulan dari penelitian ini adalah Rasio kemandirian pemda propinsi di tahun 2020 sebesar 50% adalah rendah. Hal ini mengindikasikan keterlibatan pemerintah pusat dalam memberikan bantuan sangat tinggi. Tingkat keikutsertaan masyarakat dalam pembangunan daerah juga rendah. Rasio efektivitas sebesar 70% efektif dan sangat efektif. Hal ini berarti pemda dapat merealisasikan PAD yang dianggarkan sesuai target. Sedang 30% belum dapat merealisasikan PAD sesuai target.

Keterbatasan penelitian ini adalah lamanya mendapatkan data laporan keuangan pemda yang telah diaudit. Hal ini dikarenakan selesai diaudit bulan Oktober tahun berikutnya. Saran penelitian selanjutnya adalah Sebaiknya pemda propinsi di Indonesia lebih memaksimalkan sumber-sumber PAD baik yang sudah dieksplor atau yang belum, diharapkan ketergantungan terhadap sumber dana eksternal dapat diminimalisir. Dapat membandingkan rasio kemandirian dan efektivitas pemerintah daerah propinsi sebelum dan sesudah pandemi covid 19. Dapat menggunakan sampel pemerintah daerah kabupaten/kota Dapat menggunakan rasio lain seperti rasio efisiensi dan rasio keserasian.

DAFTAR PUSTAKA

- Arumdani, R. (2019). Analisis Rasio Keuangan Daerah Dalam Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kota Medan. *Skripsi, UMSU*.
- Halim, A., & Kusufi, S. (2012). *Akuntansi Sektor Publik Teori Konsep dan Aplikasi*, Salemba Empat, Jakarta
- Akbar R, (2019). Pengukuran Kinerja dan Akuntabilitas Publik di Indonesia studi Awal di Pemerintah Daerah, *Jurnal Akuntansi dan akuntabilitas Publik (JAAP, Vol. 1, No. 1, 1-16*, Yogyakarta.
- Christian, Lintje, Natalia, (2017). Analisis Pengukuran Kinerja Keuangan Pada Pemerintah Kota Tomohon, *Jurnal Riset akuntansi Going concern 12 (2)*, 782-791
- Lazyra KS, (2010), Analisis Rasio Keuangan Daerah Dalam Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Medan, *Skripsi*, Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara.
- Mahmudi, (2016). *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*, Yogyakarta, UPP AMP YKPN
- Oliviana, Juntje, Dhullo, (2019). Analisis Penilaian Kinerja Sektor Publik Studi Kasus Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Minahasa Tenggara, *Jurnal EMBA, Vol 7. No. 3*
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020
- Peraturan Pemerintah No. 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
- Pilat, J. J., & Morasa, J. (2017). Analisis Rasio Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Manado Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemkot Manado Tahun anggaran 2011-2015. *Jurnal Accountability Vol. 06; No. 01*, 45-56.
- Pramono, J. (2014). Analisis rasio keuangan untuk menilai kinerja keuangan Pemda. *Among Makarti Vol. 7 No. 13*.

-
- Rahajeng, A.D. (2018). Analisis Pengukuran Kinerja Organissi Sektor Publik Dengan Pendekatan Value For Money (Studi Kasus Di Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman), *Skripsi*, Universitas Sanatha Dharma, Yogyakarta.
- Rahmatina, A.Z.N, (2011). Pengukuran Kinerja Peemrintah Kota Bandung Menggunakan Analisis Rasio Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung Tahun Anggaran 2005-2009, *Skripsi*, Institut Manajemen Telkom, Bandung
- Sholikhah, M. (2017). Analisis Rasio Untuk Mengukur Kinerja Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya, *Skripsi*.
- Sumual, C. D., Kalangi, L., & Gerunggai, N. Y. (2017). Analisis Pengukuran Kinerja Keuangan Pada Pemerintah Kota Tomohon. *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern*, 782-791.
- Wulandari, I., Nugraeni, & Wafa, Z. (2018). Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Financial Distress Pemerintah Daerah. *Jurnal Riset Akuntansi Mercu Buana (JRAMB) Vol. 4 No.2*. doi : <https://doi.org/10.26486/jramb.v4i2.639>